

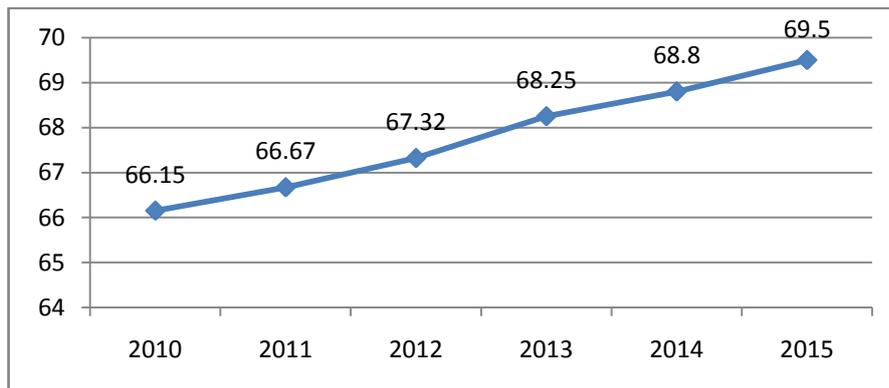
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Peneliti memilih objek penelitian ini karena menurut berita resmi statistik dari BPS Jawa Barat No. 38/07/32/Th.XVIII, 1 Juli 2016 secara umum, pembangunan manusia Jawa Barat terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2015 (Gambar 1.1).

Gambar 1.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat Tahun 2010-2015



Sumber : BPS, 2015

Secara umum, pembangunan manusia Jawa Barat terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2015. IPM Jawa Barat meningkat dari 66,15 pada tahun 2010 menjadi 69,50 pada tahun 2015. Selama periode tersebut, IPM Jawa Barat rata-rata tumbuh sebesar 0,99 persen per tahun. Pada periode 2014-2015, IPM Jawa Barat tumbuh 1,01 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2013-2014, hanya tumbuh sebesar 0,80 persen. Meskipun selama periode 2010 hingga 2015 IPM Jawa Barat menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Jawa

Barat masih stagnan. Hingga saat ini, pembangunan manusia Jawa Barat masih berstatus “sedang”, dan masih sama sejak tahun 2010.

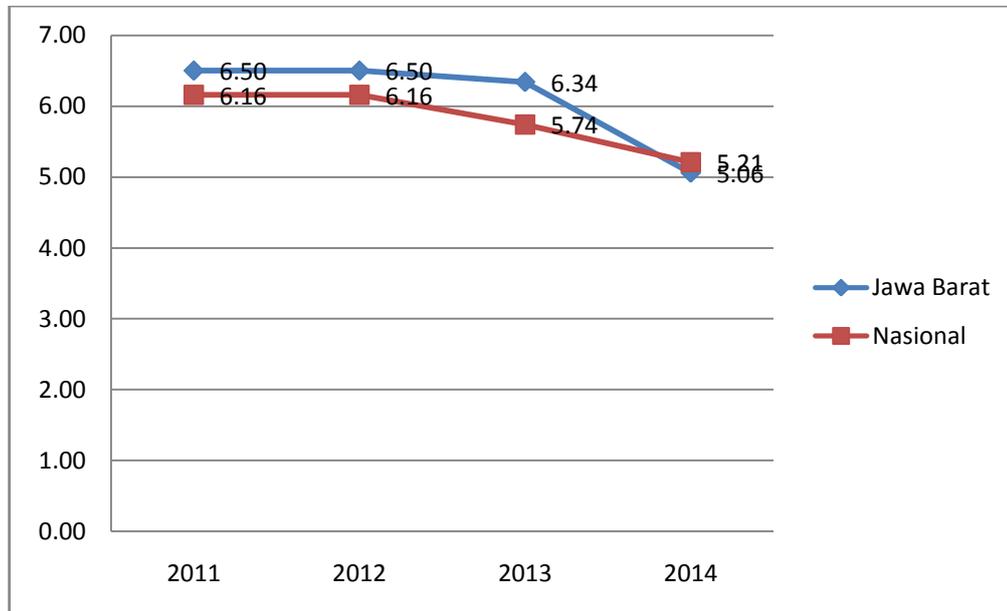
1.2 Latar Belakang Penelitian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif, selain pendapatan nasional per kapita, untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara (Harahap, 2011). Menurut Badan Pusat Statistik (2016), IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai serta standar hidup layak. Sedangkan manfaat IPM menurut badan pusat statistik, merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing.

Menurut berita yang dikutip dari *Pikiran Rakyat* (02/02/17), Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Sairi Hasbullah mengatakan, ketimpangan di Jawa Barat berada di atas rata-rata nasional sejak tahun 2011. "Sebelumnya pun memang selalu mendekati batas ketimpangan rata-rata nasional. Namun sejak 2011 selalu berada di atas rata rata," ujarnya.

Dia menambahkan, Jawa Barat merupakan kawasan industri yang rawan terjadi ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Meskipun demikian, berdasarkan grafik terjadi peningkatan masyarakat kelas menengah. "Itu artinya aktifitas ekonomi masyarakat bawah kurang berkembang secara baik. Pembangunan di Jawa Barat kurang berdampak pada masyarakat bawah," ujarnya. Menurut Sairi, proses pembangunan lebih banyak dinikmati oleh lapisan kelompok menengah.

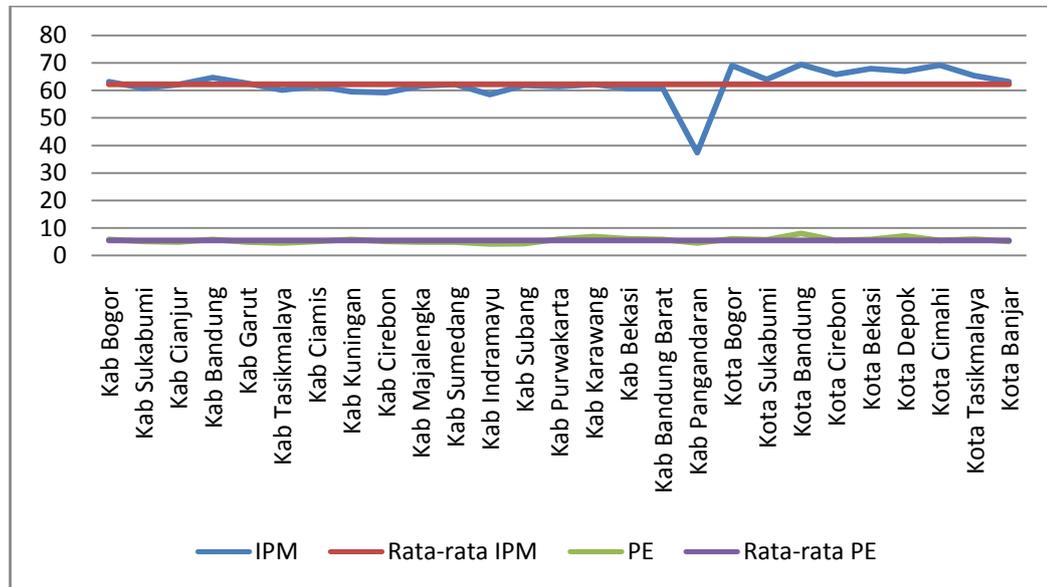
Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan PDRB



Sumber :BPS, 2014

Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum. menurut Tambunan (2011:40) menyatakan “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.” Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, (Tambunan, 2011) sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Kinerja perekonomian (Gambar 1.2) Provinsi Jawa Barat selama tahun 2012-2014 berfluktuatif dan memiliki kecenderungan menurun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut sebesar 6,1 persen lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 5,90 persen.

Gambar 1.3
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap peningkatan IPM
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014



Sumber: BPS Jawa Barat, 2015 (data diolah)

Gambar 1.3 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2014 terbagi dalam empat kelompok.

Pertama, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok dan Tasikmalaya termasuk pada kelompok I. Dimana Tabel 1.1 menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia berada di atas rata-rata provinsi.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Diatas Rata-rata Provinsi

Kota dan Kabupaten	PE	IPM
Kab Bogor	5,74	63,18
Kab Bandung	5,75	64,62
Kab Karawang	6,82	62,24
Kota Bogor	6,06	69,08

(bersambung)

(sambungan)

Kota Sukabumi	5,70	63,93
Kota Bandung	7,96	69,40
Kota Bekasi	5,73	67,84
Kota Depok	7,03	66,96
Kota Tasikmalaya	5,93	65,32
Rata-rata	5,49	62,24

Sumber : BPS Jawa Barat, 2015 (data diolah)

Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam kondisi ini pertumbuhan ekonomi telah sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Tantangan yang dihadapi pemerintah dengan kondisi yang baik ini adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat termasuk pada kelompok II. Dimana Tabel 1.2 menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi diatas rata-rata namun IPM dibawah rata-rata provinsi.

Tabel 1.2

Pertumbuhan Ekonomi Diatas Rata-rata, IPM Dibawah Rata-rata Provinsi

Kota dan Kabupaten	PE	IPM
Kab Kuningan	5,76	59,53
Kab Purwakarta	5,91	61,35
Kab Bekasi	5,99	60,73
Kab Bandung Barat	5,78	60,64
Rata-rata	5,49	62,24

Sumber: BPS Jawa Barat, 2015(data diolah)

Hal ini menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas rata-rata belum tentu dapat menjamin tinggi IPM menjadi diatas rata-rata provinsi (*high-growth, less pro-human development*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah tersebut adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan meningkatkan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang dan Kabupaten Pangandaran termasuk pada kelompok III. Dimana Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia dibawah Rata-rata Provinsi.

Tabel 1.3
Pertumbuhan Ekonomi dan IPM dibawah Rata-rata Provinsi

Kota dan Kabupaten	PE	IPM
Kab Sukabumi	5,04	60,79
Kab Cianjur	4,85	62,09
Kab Tasikmalaya	4,50	60,06
Kab Ciamis	5,11	61,48
Kab Cirebon	5,09	59,16
Kab Majalengka	4,92	61,66
Kab Sumedang	4,83	62,18
Kab Indramayu	4,18	58,46
Kab Subang	4,28	61,80
Kab Pangandaran	4,51	37,32
Rata-rata	5,49	62,24

Sumber: BPS Jawa Barat, 2015(data diolah)

Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam kondisi ini pertumbuhan ekonomi telah sejalan dengan peningkatan IPM (*low growth, less pro-human*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Keempat, Kabupaten Garut, Kota Cirebon, Kota Cimahi dan Kota Banjar termasuk pada kelompok IV. Dimana Tabel 1.4 menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dibawah rata-rata provinsi tapi Indeks Pembangunan Manusia diatas rata-rata provinsi.

Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti industri manufaktur, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan dan kelautan.

Tabel 1.4

Pertumbuhan Ekonomi Dibawah Rata-rata, IPM Diatas Rata-rata Provinsi

Kota dan Kabupaten	PE	IPM
Kab Garut	4,85	62,49
Kota Cirebon	5,45	65,81
Kota Cimahi	5,42	69,21
Kota Banjar	5,11	63,15
Rata-rata	5,49	62,24

Sumber: BPS Jawa Barat, 2015 (data diolah)

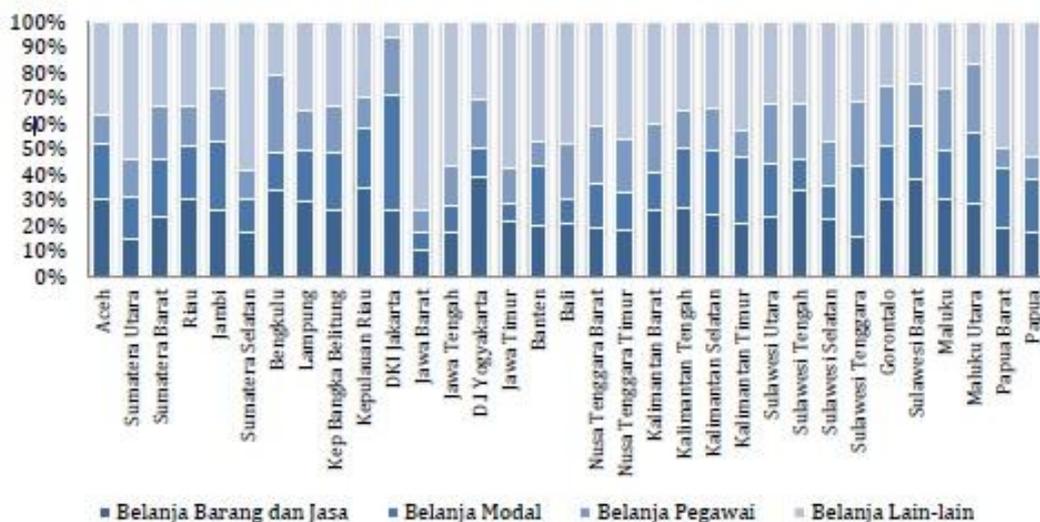
Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain lain yang sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Setyowati dan Suparwati (2012), realisasi dari PAD dialokasikan terhadap kebutuhan pembangunan daerah seperti sarana dan prasarana transportasi, tempat ibadah, sarana pendidikan dan pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Sari dan Supadmi (2016) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM. Dengan meningkatnya PAD, maka dapat meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana serta pembangunan lainnya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Belanja Daerah, menurut Sukirno (2000) yang dikutip Bahrudin (2012), pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk daerah/regional. Berdasarkan Seri Analisis

Gambar 1.4

Komposisi Belanja Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun 2014



Sumber : BPS, 2014

Pembangunan Wilayah Jawa Barat (Gambar 1.4) menunjukkan bahwa komposisi belanja pemerintah daerah Jawa Barat pada tahun 2014 adalah yang paling rendah diantara provinsi lain di Indonesia. Rasio belanja modal di Jawa Barat pada tahun 2014 sebesar 6,56 persen, dan rasio belanja pegawai sebesar 8,93.

Penyerapan belanjadaerah dipengaruhi oleh kinerja SKPD sehingga peningkatan kinerja SKPD diharapkan dapat optimal. Apabila anggaran pada belanja publik lebih diorientasikan pada belanja modal akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Belanja modal di Jawa Barat tergolong rendah seiring dengan

pembangunan proyek infrastruktur, proyek pengadaan berbagai macam sektor, jamkesmas, PNPM, dan program sosial lainnya. Efektivitas dari belanja pembangunan tersebut perlu lebih ditingkatkan, sehingga dapat berdampak nyata terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah Jawa Barat.

Tingginya angka belanja daerah pada suatu daerah serta pengalokasian belanja daerah yang tepat dan adil secara merata oleh pemerintah seharusnya dapat meningkatkan pembangunan manusia di daerah tersebut khususnya dalam pengalokasian belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang memiliki pengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian Suryati (2015) yang berbicara mengenai belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan IPM. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2014)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan mengukur capaian pembangunan manusia pada suatu negara. Pembangunan manusia merupakan salah satu dimensi pembangunan suatu wilayah berkelanjutan bersifat multidimensi untuk mengatasi berbagai masalah publik. Telah ditingkatkannya komposisi dari setiap komponen-komponen pembangunan manusia tidak selalu menunjukkan keberhasilan.

Dalam hal ini, pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat bersatur sedang dibandingkan seluruh Provinsi di Indonesia dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun hal ini tidak menjamin apakah seluruh Kota dan Kabupaten di

Jawa Barat memiliki kualitas yang baik. IPM Kota dan Kabupaten di Jawa Barat masih ada yang dibawah rata-rata, hal tersebut masih perlu diperhatikan untuk ditingkatkan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut :

1. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014?
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014?
5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014?
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Indeks

Pembangunan Manusia di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014?

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014?
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014?
5. Bagaimana pengaruh secara parsial Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014?

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1.6.1 Aspek Teoritis

Bagi bidang akademis, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Bagi penulis semoga penelitian digunakan sebagai tambahan wawasan mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan IPM.

1.6.2 Aspek Praktis

Bagi para pengguna informasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan IPM di Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan penelitian ini dapat mengurangi ketimpangan intra wilayah terutama yang mempengaruhi bidang pendidikan dan kesehatan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan satu variabel dependen, variabel dependen dalam penelitian ini adalah IPM. Tiga variabel independen, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh IPM baik secara simultan maupun parsial.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat. Objek untuk penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Barat. Data penelitian yang diperoleh peneliti adalah dari website resmi BPS Pusat dan BPS Jawa Barat.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan September sampai bulan Desember 2016. Fokus dalam penelitian ini adalah pada periode tahun 2010 sampai dengan 2014, karena Laporan Realisasi Anggaran yang tersedia hanya dari tahun 2010 sampai tahun 2014.

1.8 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan mendukung solusi permasalahan, serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, teknis analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian, mencakup analisis responden terhadap variabel penelitian, analisis statistik serta analisis pengaruh variabel.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran peneliti baik dari segi aspek teoritis maupun praktis.

"Halaman ini sengaja dikosongkan"